



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB	I	PENDAHULUAN	1
BAB	II	PENETAPAN KINERJA.....	18
BAB	III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
BAB	IV	PENUTUP.....	51

LAMPIRAN :

LAMPIRAN 1	:	STRUKTUR ORGANISASI
LAMPIRAN 2	:	PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
LAMPIRAN 3	:	PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
LAMPIRAN 4	:	EVALUASI KINERJA KEGIATAN
LAMPIRAN 5	:	EVALUASI KINERJA PROGRAM

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dari penyusunan LKjIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2019.

Demikian penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Sukamara, Januari 2020

Kepala BPKAD
Kabupaten Sukamara



Drs. PRIHATIN SURIANSYAH
NIP. 19650719-199103 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara terbentuk sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah yang turut aktif berperan serta dalam pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukamara dengan mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sukamara yang berdasarkan landasan hukum antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Nomor 56 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Nomor 537);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Penyempurnaan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara no 67).
9. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memuat standar pelayanan yang menerapkan partisipasi, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, pemikiran dan wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efesiensi dan efektifitas serta profesionalisme yang diiringi dengan komitmen yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis serta seluruh komponen bangsa maka diharapkan dapat mewujudkannya.

Penyelenggaraan pemerintahan menghasilkan berbagai jenis keluaran yang perlu dikenali dan diidentifikasi, antara lain adalah sebagai berikut :

1. *Pelayanan penyediaan barang-barang publik* yaitu pelayanan dalam bentuk penyediaan atau jenis barang yang digunakan atau dibutuhkan publik;
2. *Pelayanan jasa* yaitu pelayanan dalam bentuk penyediaan dan pelayanan jasa yang dibutuhkan publik;

3. *Pelayanan administratif* yaitu pelayanan dalam bentuk administratif berupa dokumen-dokumen resmi yang dibutuhkan publik.

Kualitas maupun kuantitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada publik dijawab melalui sarana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana AKIP merupakan sarana tepat dalam mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi pemerintah kepada rakyat maupun perangkat daerah kepada Kepala Daerah.

Sebagai langkah awal pelaksanaan AKIP, sekaligus guna memberikan pedoman bagi setiap langkah penyelenggaraan kegiatan satuan kerja perangkat daerah, maka perlu ditetapkan dokumen perencanaan strategis tahunan yang menggambarkan tujuan dan sasaran kebijakan dan program satuan kerja. Dalam hal ini bisa dikatakan AKIP tidak akan dapat dilaksanakan sebelum adanya penyusunan Renstra, karena Renstra merupakan unsur utama dalam penyusunan AKIP.

C. ASPEK STRATEGIS

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara dengan tugas fungsinya adalah pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dimana sebagai organisasi yang baru dibentuk selaku salah satu unsur pelaku pembangunan di daerah Kabupaten Sukamara.

Dari segi personil, jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara masih jauh dari mencukupi sehingga mempengaruhi hasil capaian kinerja terutama dalam hal efesiensi dan optimalisasi percepatan penyelesaian tugas dan fungsi. Jumlah pegawai yang ada tidak sebanding dengan banyaknya tugas yang harus diselesaikan sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian tugas. Selain itu

terjadinya penumpukan tugas dan tanggung jawab yang di emban oleh satu orang pegawai.

Tidak terlepas dari tugas dan fungsinya, diharapkan dengan adanya koordinasi, sinkronisasi, aktualisasi, pengendalian dan pengawasan yang efektif dan efisien sehingga penganggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan tidak terjadi. Dengan demikian perencanaan pembangunan tidak hanya sekedar dokumen perencanaan semata untuk memenuhi persyaratan peraturan perundangan melainkan gambaran pembangunan yang secara terpadu dan sinergis terwujud nyata guna kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sukamara.

Sistem pelayanan keuangan yang cepat dan tepat menjadi ideal dalam memberikan pelayanan yang kepada masyarakat dan SKPD lain. Pelayanan yang cepat diharapkan tanpa birokrasi yang berbelit dan panjang dengan alur kerja yang lebih singkat, mudah dan tidak membingungkan, tepat dengan persyaratan yang lengkap, sah dan benar serta murah dari segi biaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan daerah dapat ditingkatkan dengan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat sehingga diharapkan menumbuhkan kembangkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha sebagai obyek pajak, menggali dan mengembangkan potensi-potensi pendapatan daerah serta mengoptimalkan kekayaan daerah dengan pola kerja sama pihak ketiga dan atau menjalankan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sebagai usaha alternatif untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pada pengelolaan aset daerah masih perlu dilakukan pembenahan sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran masalah aset. Untuk itu diharapkan dapat secara rutin atau tiap tahun dilakukan pendataan ulang sekaligus pengecekan akan aset daerah, baik itu keberadaan, kondisi fisik dan jumlah. Penilaian aset, pendataan, inventarisasi, distribusi, penghapusan, pelelangan serta

pemeliharaan aset akan menjadi hal penting sehingga akan diketahui jumlah dan nilai aset daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Sukamara.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara dimana memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan prospektif jangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework*), penerapan penganggaran secara terpadu (*Unified Budget*) dan penerapan penganggaran kinerja (*Performance Budget*). Dengan mengacu kepada perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran tersebut, akan lebih menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran.

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau kurang. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Fokus utama dalam menentukan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya unit kerja dalam kegiatan dan operasionalnya.

Dengan mengacu hal tersebut diatas, sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara adalah :

1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
2. Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah.
3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
4. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat atau pihak ketiga.
5. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah dilingkungan SKPD.

Untuk mencapai sasaran sangat diperlukan penekanan khusus dalam bentuk kebijakan, yaitu pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan yang diambil harus mempunyai karakteristik, cocok, relevan dengan

permasalahan, dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan akibat yang timbul, serta tidak hanya bersifat teoritis.

Program merupakan kumpulan kegiatan secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai penjabaran dari kebijakan yang diambil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara.

Kebijakan yang diambil oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Penyempurnaan kebijakan dan sistem prosedur keuangan dan aset daerah;
2. Peningkatan investasi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
3. Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui :
 - a. Pendataan secara terus menerus terhadap Objek dan Wajib Pajak;;
 - b. Pendayagunaan aset daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah;
 - c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. Penyederhanaan pungutan (efisiensi biaya dan administrasi pungutan);
 - e. Penegakan hukum kepada para penghindar wajib pajak;
4. Melestarikan obyek pajak yang sudah ada dan menambah sumber pendapatan daerah baru dari sektor retribusi dan penerimaan lainnya yang memungkinkan dapat digali lebih maksimal;
6. Pengendalian dan pengawasan pengelolaan aset daerah diarahkan agar berdayaguna dan berhasil guna untuk peningkatan pendapatan daerah;
7. Belanja daerah diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pelayanan masyarakat, pembangunan dan pemerintahan secara efektif, efisien dan produktif yang dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat;

8. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan yang bertanggung jawab atas pelayanan publik atau masyarakat secara langsung;
9. Pengawasan dalam anggaran belanja agar lebih terarah dan sesuai dengan rencana program dan kegiatan dari tugas pokok dan fungsi masing-masing badan/dinas/kantor atau unit kerja;
10. Peningkatan pelayanan pembangunan secara umum dan pelayanan publik yang cepat dan tepat serta mudah tanpa kesulitan melalui peningkatan kemampuan aparatur dalam fungsi pelayanan kepada masyarakat;

D. KONDISI UMUM

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Nomor 56 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Nomor 537);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara no 67);
6. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara.

2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara no 67) dan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara mempunyai tugas disamping melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah lingkup Kabupaten Sukamara juga mempunyai tugas yang lebih luas yaitu untuk melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
2. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
3. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
4. Mengesahkan DPA dan DPPA-SOPD ;
5. Menetapkan SPD;

6. Pengelolaan dan pemungutan pendapatan ;
7. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
8. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
9. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan aset daerah;
10. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset daerah;
11. Pengelolaan ketatausahaan Badan.

3. Gambaran Umum Badan/Dinas/Instansi

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara maka dibagi dalam beberapa bagian, yaitu :

1. Sekretariat yang secara manajerial dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang di pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi serta melaporkan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran.
- b. Sub Bagian Keuangan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, yang mempunyai tugas

merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi serta melaporkan urusan administrasi keuangan.

- c. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan yang di pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi serta melaporkan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang.
2. Bidang PBB dan BPHTB yang secara manajerial dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan tugas Badan meliputi Perumusan Kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pendaftaran, penetapan, pendataan dan pelayanan di bidang PBB-P2 dan BPHTB, perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah serta evaluasi dan pelaporan realisasi hasil penerimaan pendapatan daerah.

Bidang Pendaftaran dan Penetapan terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi serta melaporkan kegiatan Pendataan, Pendaftaran dan pelayanan dibidang PBB-P2 dan BPHTB.
- b. Sub Bidang Penetapan dan Perhitungan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi serta melaporkan kegiatan Penetapan dan Perhitungan PBB-P2 dan BPHTB.
- c. Sub Bidang Verifikasi dan Penagihan Piutang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan Verifikasi dan Penagihan Piutang, PBB-P2 dan BPHTB.

3. Bidang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya secara manajerial dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas meliputi penagihan, piutang, pengurangan/keringanan, keberatan dan banding, pengendalian operasioanal, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah, retribusi daerah.

Bidang Penagihan terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi serta melaporkan kegiatan Pendataan dan Pelaporan dibidang pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b. Sub Bidang Penetapan dan Perhitungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi serta melaporkan kegiatan Penetapan dan Perhitungan dibidang pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c. Sub Bidang Verifikasi dan Penagihan Piutang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi serta melaporkan kegiatan Verifikasi dan Penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Bidang Anggaran yang secara manajerial dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan operasional, mengelola, mengordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyusunan program

dan petunjuk teknis penyelenggaraan penyusunan pengelolaan anggaran daerah.

Bidang Anggaran terdiri atas :

- a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan anggaran pendapatan.
 - b. Sub Bidang Pembiayaan dipimpin oleh Kepala Sub bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan Kebijakan Pembiayaan dalam Pelaksanaan Anggaran.
 - c. Sub Bidang Pengelolaan Gaji dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi serta melaporkan Penyelenggaraan Penggajian.
5. Bidang Perbendaharaan yang secara manajerial dipimpin oleh Kepala Bidang dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan belanja anggaran daerah.

Bidang Belanja terdiri atas :

- a. Sub Bidang Belanja dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan Belanja Daerah.

- b. Sub Bidang Kas Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi serta melaporkan Penyelenggaraan Kas Daerah.
 - c. Sub Bidang Dana Transfer dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi serta melaporkan Penyelenggaraan Dana Transfer.
6. Bidang Akuntansi yang secara manajerial dipimpin oleh Kepala Bidang dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah.

Bidang Akuntansi terdiri atas :

- a. Sub Bidang Verifikasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan Pemverifikasian.
- b. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan.
- c. Sub Bidang Pembinaan Akuntansi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan Pembinaan Akuntansi.

7. Bidang Aset Daerah yang secara manajerial dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pengelolaan aset daerah.

Bidang Aset Daerah terdiri atas :

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan Perencanaan dan Pengadaan Aset Daerah.
- b. Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah.
- c. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

4. Personalia

Jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara per 31 Desember 2019 sebanyak 72 orang yang dapat dikelompokkan menurut golongan dan jenjang pendidikan sebagai berikut :

Tingkat Pendidikan		Kontrak Administrasi	Golongan				Jumlah
			I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	-	0
2	SMP	-	1	-	-	-	1
3	SMA	11	-	10	-	1	22
4	D - 1	-	-	-	-	-	-
5	D - 2	-	-	-	-	-	-
6	D - 3	2	-	-	10	-	12
7	S - 1	8	-	-	24	4	36
8	S - 2	-	-	-	1	-	1
9	S - 3	-	-	-	-	-	-
Jumlah		21	1		35	6	72

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP

Pada dasarnya laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara selama tahun 2019. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2019 ini merupakan perbandingan antara realisasi dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini.

Bab I – Pendahuluan,

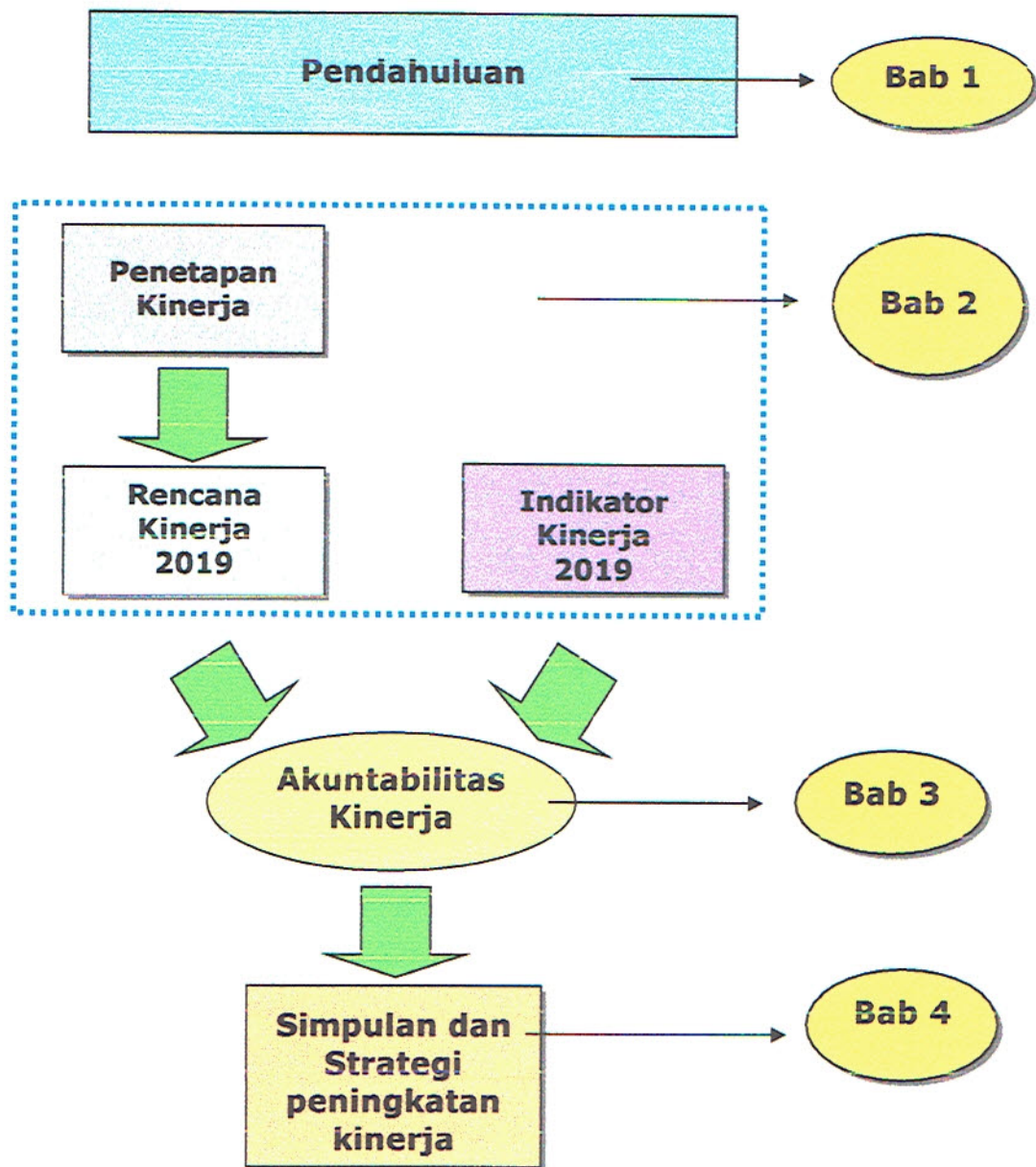
menjelaskan secara ringkas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara

Bab II – Penetapan Kinerja, menjelaskan indikator-indikator penetapan kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara dalam melakukan penilaian kinerja selama tahun 2019.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2019.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 ini dan strategi peningkatan kinerja di masa datang.

Keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang selanjutnya dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut :



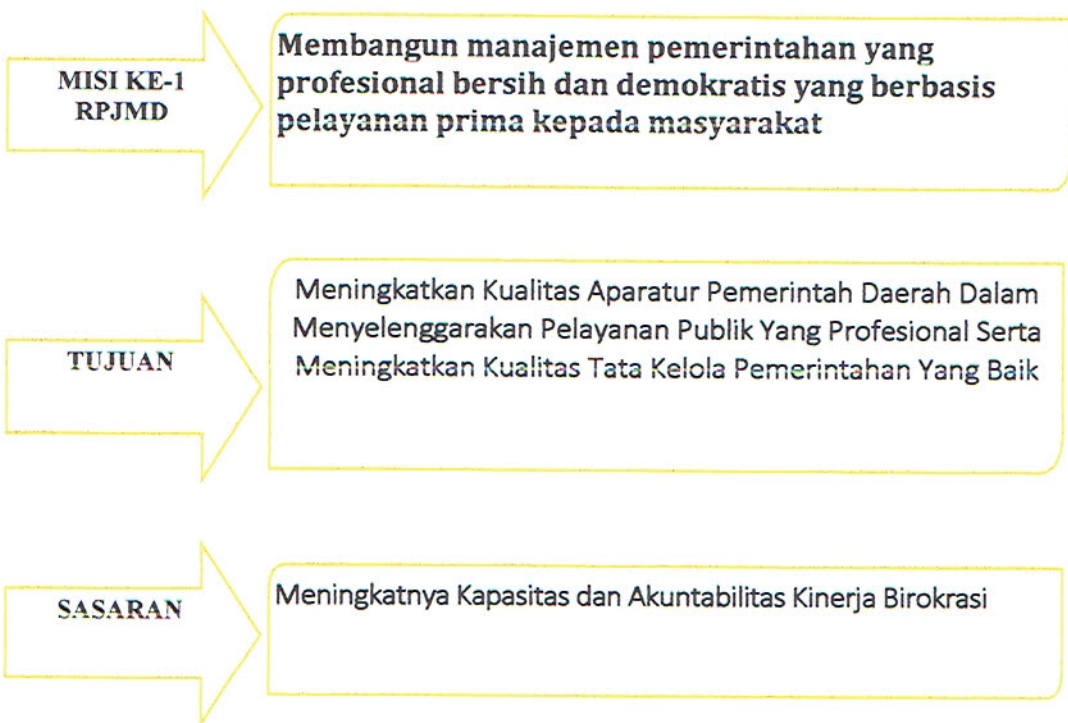
BAB II

PENETAPAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara menyusun Rencana Program dan Kegiatan dalam rangka memberikan dukungan atas misi kesatu RPJMD yaitu :



Beberapa program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara yang mendukung pencapaian misi tersebut diantaranya :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan, selanjutnya tingkat SKPD menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023. Rencana Strategis sebagai implementasi RPJMD di tingkat SKPD yang disusun memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi. Isu-isu strategis di tingkat SKPD dianalisis untuk menemukan strategi yang efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara dalam menetapkan visinya harus mengacu pada visi Kabupaten Sukamara dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsinya. Visi Kabupaten Sukamara 2018-2023 adalah **“Terwujudnya masyarakat sukamara yang sejahtera, maju dan bermartabat didukung pemerintahan yang profesional”**.

2.2. Perencanaan Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran yang telah disusun, maka dapat ditentukan program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah seperti tabel berikut :

Tabel 2.1
Sasaran, Indikator dan Program Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sukamara Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program
1	Tingkat keterpaduan program kegiatan APBD untuk pencapaian RPJMD	1. Tersedianya dokumen APBD dan APBD Perubahan tepat waktu Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Daerah. 2. Tersedianya raperda tentang APBD dan APBD Perubahan 3. Tersedianya laporan pertanggung jawaban APBD 4. Tersedianya Perbub tentang laporan penjabaran pertanggung jawaban APBD	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Tingkat tertib administrasi penatausahaan keuangan SKPD	1. Penatausahaan dokumen SPM dan SP2D cepat dan tepat 2. Tersedianya dokumen data laporan penerimaan dan pengeluaran daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3	Tingkat tertib pelaporan keuangan SOPD sesuai SAP	1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Jumlah SKPD yang membuat laporan keuangan sesuai SAP.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
4	Implementasi software pengelolaan keuangan SOPD berbasis IT	1. Tersedianya Aplikasi dan database pengelolaan keuangan. 2. Tersedianya Aplikasi dan database pengelolaan BMD. 3. Tersedianya Aplikasi dan database pengelolaan pajak dan retribusi daerah 4. Terkoneksinya jaringan online disemua kecamatan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1. Meningkatnya pendapatan dari PBB dan BPHTB. 2. Bertambah Objek Pajak dan Wajib Pajak.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

6	Peningkatan pendapatan pajak dan retribusi terhadap pendapatan Asli Daerah	1. Meningkatnya Jumlah retribusi daerah dan pajak lainnya 2. Bertambah Objek retribusi daerah dan objek pajak lainnya	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
7	Tertib Perencanaan dan Penggunaan BMD	1. Tersedianya dokumen satuan standar harga 2. Tersedianya dokumen analisa kebutuhan barang	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah
8	Tertib Pencatatan dan Pengamanan Aset Daerah	1. Tersedianya dokumen BMD 2. Terlaksananya penghapusan dan pemindahtanganan BMD	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah
9	Tingkat kemampuan dan profesionalisme SDM aparatur pengelolaan keuangan.	1. Jumlah ASN yang mengikuti Diklat, Bimtek dan sosialisasi	Program Peningkatan dan Pengembangan kapasitas aparatur

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan

tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara yang ditetapkan dengan mengacu pada sasaran strategis RPJMD yaitu Menyelenggarakan *good and clean governance* (pemerintahan yang baik, efisien, efektif, bersih dan bebas KKN) dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
BPKAD Kabupaten Sukamara Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tingkat keterpaduan program kegiatan APBD untuk pencapaian RPJMD	- Tersedianya dokumen kebijakan APBD dan perubahan APBD	- 1 Buku APBD 2020 Tanggal 31 Desember 2019 - 1 Buku APBDP 2019 Tanggal 31 September 2019
		- Tersedianya raperda tentang APBD dan perubahan APBD	- 1 Buku Raperda APBD - 1 Buku Raperda APBDP
		- Tersedianya raperda tentang laporan pertanggungjawaban APBD	- 1 Buku RAPERDA
		- Tersedianya Peraturan Bupati tentang Laporan Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	- 1 Buku PERBUB
2	Tingkat tertib administrasi keuangan SOPD	- Penatausahaan dokumen SPM dan SP2D cepat tepat dan murah	- Jumlah SP2D diterbitkan dalam waktu 2 hari dan sesuai dengan yang telah di anggarkan
		- Tersedianya Dokumen data laporan penerimaan dan pengeluaran belanja	- 1 Laporan Penerimaan Daerah - 1 Laporan Pengeluaran Daerah
3	Tingkat tertib pelaporan keuangan sesuai SAP	- Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- WTP
		- Jumlah SKPD yang membuat laporan keuangan sesuai dengan SAP dan tepat waktu menyerahkan laporan keuangan	- 30 SKPD - 30 LAPORAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara

4	Implementasi software pengelolaan keuangan SOPD berbasis IT	- Adanya sistem informasi dan database pengelolaan keuangan - Adanya sistem informasi dan database pengelolaan BMD; - Adanya sistem informasi dan database tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah	- 1 Aplikasi SIMDA Keuangan - 1 Database Keuangan - 1 Aplikasi SIMDA BMD - 1 Database BMD - 1 Aplikasi SIMPADA dan 1 Database - 1 Aplikasi SIMDA Pendapatan dan 1 Database
5	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari PBB P2 dan BPHTB	- Terkoneksinya jaringan online disemua kecamatan yang ada di kabupaten sukamara - Meningkatnya Pendapatan dari PBB dan BPHTB - Bertambah Objek Pajak dan Wajib Pajak	- Terkoneksi 5 Kecamatan - Rp. 1.000.000.000.000 - 750 WP
6	Peningkatan pendapatan pajak dan restribusi terhadap pendapatan Asli Daerah	- Meningkatnya pendapatan pajak dan retribusi daerah - Bertambah Objek retribusi daerah dan objek pajak lainnya	- Rp. 4.434.794.152 - 250 WP / Tahun
7	Tertib Perencanaan dan Penggunaan BMD	- Tersedianya dokumen satuan standar harga - Tersedianya dokumen analisa kebutuhan barang	- 2 SK dan 2 Dokumen - 1 Dokumen
8	Tertib Pencatatan dan Pengamanan Aset Daerah	- Tersedianya dokumen pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD - Terlaksananya penghapusan dan pemindahtanganan aset	- 1 Laporan - Terlaksana Ielang BMD (400 Jt - Terlaksananya Penghapusan BMD

9	Tingkat kemampuan dan profesionalisme SDM aparatur pengelolaan keuangan	- Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, pelatihan dan sosialisasi	- 25 Orang
---	---	---	--

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
BPKAD Kabupaten Sukamara Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	
1	Tingkat keterpaduan program kegiatan APBD untuk pencapaian RPJMD	- Tersedianya dokumen kebijakan APBD dan APBD perubahan	- Penyusunan dan Penetapan APBD dan APBD Perubahan Tepat Waktu	Bidang Anggaran
		- Tersedianya raperda tentang APBD dan Perubahan APBD	- Penyusunan raperda tentang APBD dan APBD Perubahan	
		- Tersedianya raperda tentang laporan pertanggungjawaban APBD	- Penyusunan raperda tentang Laporan Pertanggung jawaban APBD	
		- Tersedianya Peraturan Bupati tentang Laporan Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	- Penyusunan perub tentang Laporan penjabaran Pertanggungjawaban APBD	
2	Tingkat tertib administrasi penatausahaan keuangan SOPD	- Penatausahaan dokumen SPM dan SP2D cepat tepat dan murah	- Penerbitan SPM dan SP2D Cepat dan Tepat Waktu	Bidang Akuntansi
		- Tersedianya Dokumen data laporan penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja daerah	- Penyajian laporan penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja daerah	
3	Tingkat tertib pelaporan keuangan sesuai SAP	- Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bidang Akuntansi
		- Jumlah SKPD yang membuat laporan keuangan sesuai dengan SAP dan tepat waktu menyerahkan laporan keuangan	- SOPD diharapkan Membuat laporan keuangan sesuai dan tepat waktu dalam menyerahkan laporan keuangan	

4	Implementasi software pengelolaan keuangan SOPD berbasis IT	- Adanya sistem informasi dan database pengelolaan keuangan	- Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan	ANGGARAN/ ASET/PBB dan BPHTB/ RETRIPADA
		- Adanya sistem informasi dan database pengelolaan BMD;	- Penyusunan laporan pengelolaan BMD dengan menggunakan aplikasi SIMDA BMD	
		- Adanya sistem informasi dan database tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah	- Penyusunan laporan pengelolaan Pendapatan dengan menggunakan aplikasi SIMDA Pendapatan, SISMIOPI SIMPADA	
		- Terkoneksinya jaringan online disemua kecamatan yang ada di kabupaten sukamara	- Mempermudah kecamatan dalam menyusun laporan keuangan dengan terkoneksi langsung	
5	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	- Meningkatkan Pendapatan dari PBB dan BPHTB	- Untuk meningkatkan PAD dari Sektor PBB P2 dan BPHTB	Bidang PBB dan BPHTB
		- Bertambah Objek Pajak dan Wajib Pajak		
6	Peningkatan pendapatan pajak dan restribusi terhadap pendapatan Asli Daerah	- Meningkatkan jumlah retribusi daerah dan pajak daerah lainnya	- Untuk meningkatkan PAD dari Sektor Retribusi daerah dan Pajak lainnya	Bidang RETRIPADA
		- Bertambah Objek retribusi daerah dan objek pajak lainnya		
7	Tertib Perencanaan dan Penggunaan BMD	- Tersedianya dokumen satuan standar harga	- untuk menjadi acuan dalam menyusun belanja modal barang dan jasa	Bidang Aset
		- Tersedianya dokumen rencana kebutuhan barang	- untuk menjadi acuan dalam menyusun rencana kebutuhan dalam menyusun rencana kerja	
8	Tertib Pencatatan dan Pengamanan Aset Daerah	- Tersedianya dokumen pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD	- terdatanya BMD sehingga bisa dimaksimalkan pemanfaatannya	Bidang Aset
		- Terlaksananya penghapusan dan pemindahtanganan aset	- mengurangi beban APBD dalam memelihara BMD yang sudah tidak layak atau yang mau di pindahtanggankan	

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara

9	Tingkat kemampuan dan profesionalisme SDM aparatur pengelolaan keuangan	- Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, pelatihan dan sosialisasi	- Meningkatkan mutu dan SDM aparatur dalam membuat laporan keuangan pemerintah daerah	Sekretariat
---	---	---	---	-------------

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

LKjIP 2019 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja output, indikator kinerja hasil dari seluruh kegiatan maupun indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja dapat dihitung dengan rumus, yaitu :

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Rumus ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang makin tinggi realisasinya menggambarkan pencapaian kinerja yang baik.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, ditetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Katagori Capaian
I	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
II	91 % sampai 100 %	Berhasil
III	81 % sampai 90 %	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 81 %	Kurang Berhasil

ANALISIS ATAS PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara memiliki 9 (sembilan) sasaran dan 7 (tujuh) program yang harus dilaksanakan. Dari 9 (sembilan) sasaran dan 7 (tujuh) program yang telah ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara dapat diikhtisarkan bahwa 1 (satu) indikator kinerja sasaran berkategori **Sangat Berhasil**, 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran berkategori **Berhasil** serta 1 (satu) indikator kinerja berkategori **Kurang Berhasil** yaitu sebagai berikut :

No	Nama Sasaran	Penanggung Jawab	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
1	Tingkat keterpaduan program kegiatan APBD untuk pencapaian RPJMD	BPKAD	100 %	Berhasil
2	Tingkat tertib administrasi penatausahaan keuangan SKPD	BPKAD	100 %	Berhasil
3	Tingkat tertib pelaporan keuangan SOPD sesuai SAP	BPKAD	100 %	Berhasil

4	Implementasi software pengelolaan keuangan SOPD berbasis IT	BPKAD	100 %	Berhasil
5	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	BPKAD	135 %	Sangat Berhasil
6	Peningkatan pendapatan pajak dan redistribusi terhadap pendapatan Asli Daerah	BPKAD	90,55 %	Berhasil
7	Tertib Perencanaan dan Penggunaan BMD	BPKAD	100 %	Berhasil
8	Tertib Pencatatan dan Pengamanan Aset Daerah	BPKAD	50 %	Kurang Berhasil
9	Tingkat kemampuan dan profesionalisme SDM aparatur pengelolaan keuangan.	BPKAD	100,00	Berhasil
Total Keseluruhan Pencapaian Sasaran			97,28	Berhasil

Adapun rincian capaian kinerja atas 9 (sembilan) sasaran dengan kategorinya adalah sebagai berikut :

1 Sasaran : Tingkat keterpaduan program kegiatan APBD untuk pencapaian RPJMD;

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran tersebut adalah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2019 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran / Outcome	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Tersedianya dokumen APBD dan APBD Perubahan tepat waktu	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100
2.	Tersedianya raperda tentang APBD dan APBDP	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100
3.	Tersedianya Laporan Pertanggung jawaban APBD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100
4.	Tersedianya Perbub tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD	1 Perbub	1 Perbub	1 Perbub	100
Rata-rata capaian					100

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran *Tingkat keterpaduan program kegiatan APBD untuk pencapaian RPJMD* adalah sebesar **100 %** yang berarti masuk dalam katagori capaian **Berhasil** yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja “Tersedianya dokumen APBD dan APBD Perubahan tepat waktu”

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator tersebut diatas adalah tersedianya 2 Dokumen tentang APBD dan APBDP atau 100 % dari targetnya yang sebesar 2 Dokumen tentang APBD dan APBDP. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Berhasil**.

Faktor kunci keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah kemauan, tekad dan komitmen serta kerjasama yang dilakukan semua pihak terkait khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mewujudkan tersedianya DPA APBD 2020 dan DPPA APBDP 2019 Tepat waktu.

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagi berikut :

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan (Penurunan)	Naik / Turun
Tahun 2018	50	0	Turun
Tahun 2019	100	50	Naik

2. Indikator Kinerja “Tersedianya Raperda tentang APBD dan APBDP”

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator tersebut diatas adalah sebesar **2 Dokumen** atau 100 % dari targetnya yang sebesar **2 Dokumen** . Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Berhasil**.

Faktor kunci keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah komitmen dan kerjasama yang dilakukan semua pihak terkait khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam rangka mewujudkan tersedianya RAPERDA APBD dan RAPERDA APBDP Tepat waktu.

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan (Penurunan)	Naik / Turun
Tahun 2018	100	0	Tetap
Tahun 2019	100	0	Tetap

3. Indikator Kinerja "Tersedianya Laporan Pertanggung jawaban APBD"

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator tersebut diatas adalah sebesar **1 Laporan** atau 100 % dari targetnya yang sebesar **1 Laporan**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Berhasil**.

Faktor kunci keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah komitmen dan kerjasama yang dilakukan semua pihak terkait khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam rangka mewujudkan tersedianya Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu.

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan (Penurunan)	Naik / Turun
Tahun 2018	100	0	Tetap
Tahun 2019	100	0	Tetap

4. Indikator Kinerja "Tersedianya Perbub tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD"

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator tersebut diatas adalah sebesar **1 Perbub** atau 100 % dari targetnya yang sebesar **1 Perbub** . Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Berhasil**.

Faktor kunci keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah komitmen dan kerjasama yang dilakukan semua pihak terkait khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam rangka mewujudkan tersedianya Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD Tepat waktu.

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan (Penurunan)	Naik / Turun
Tahun 2018	100	0	Tetap
Tahun 2019	100	0	Tetap

2 Sasaran : Tingkat Tertib administrasi penatausahaan keuangan SKPD

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran tersebut adalah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada Tahun 2019 sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Sasaran / Outcome	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Penatausahaan Dokumen SPM dan SP2D Cepat dan tepat	Hari	2	2	100
2.	Tersedianya dokumen data penerimaan dan pengeluaran daerah	Laporan	1	1	100
Rata-rata capaian					100

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran *Tingkat Tertib administrasi penatausahaan keuangan SKPD* adalah sebesar **100,00 %** yang berarti masuk dalam katagori capaian **Berhasil** yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja “Penatausahaan Dokumen SPM dan SP2D Cepat dan tepat”

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator tersebut diatas adalah selama **2 Hari** atau 100 % dari targetnya yang sebesar **2 Hari**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Berhasil**.

Faktor kunci keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah kemauan, tekad dan komitmen serta kerjasama yang dilakukan semua pihak terkait khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan dalam bidang Perbendaharaan sehingga terlaksana pelayanan prima kepada masyarakat atau pihak ketiga.

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan (Penurunan)	Naik / Turun
Tahun 2018	100	0	Tetap
Tahun 2019	100	0	Tetap

2. Indikator Kinerja *"Tersedianya dokumen data penerimaan dan pengeluaran daerah"*

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator tersebut diatas adalah **1 Laporan** atau 100 % dari targetnya yang tersedia **1 Laporan**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Berhasil**.

Faktor kunci keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah kemauan, tekad dan komitmen serta kerjasama yang dilakukan semua pihak terkait khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam rangka mewujudkan tersedianya data penerimaan dan pengeluaran daerah yang relevan dan akurat.

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan (Penurunan)	Naik / Turun
Tahun 2018	100	0	Tetap
Tahun 2019	100	0	Tetap

3 Sasaran : **Tingkat tertib pelaporan SKPD sesuai SAP berbasis Akrua**

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran tersebut adalah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara. Sasaran tersebut terumuskan

dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada Tahun 2019 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran / Outcome	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WTP	100
2.	Jumlah SKPD yang membuat laporan keuangan Sesuai SAP	SKPD	30 SKPD	30 SKPD	100
Rata-rata capaian					100

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran *Tingkat tertib pelaporan SKPD sesuai SAP berbasis Akrua* adalah sebesar **100 %** yang berarti masuk dalam katagori capaian **Berhasil** yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja “Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah”

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator tersebut diatas adalah **Opini WTP** atau 100 % dari targetnya yaitu meraih **Opini WTP**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Berhasil**.

Faktor kunci keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah kemauan, tekad dan komitmen serta kerjasama yang dilakukan semua pihak terkait khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam rangka mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel, akurat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan (Penurunan)	Naik / Turun
Tahun 2018	WTP	0	Tetap
Tahun 2019	WTP	0	Tetap

2. Indikator Kinerja "Jumlah SKPD yang membuat laporan keuangan Sesuai SAP"

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator tersebut diatas adalah sebanyak **30 SKPD** atau 100 % dari targetnya yang sebanyak **30 SKPD**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Berhasil**.

Faktor kunci keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah kemauan, tekad dan komitmen serta kerjasama yang dilakukan semua pihak terkait khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam rangka mewujudkan laporan keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang akuntabel, akurat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan (Penurunan)	Naik / Turun
Tahun 2018	100	0	Tetap
Tahun 2019	100	0	Tetap

4 Sasaran : Implemetasi software pengelolaan keuangan SKPD berbasis Informasi Teknologi

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran tersebut adalah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada Tahun 2019 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran / Outcome	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Tersedianya Aplikasi dan database pengelolaan keuangan	Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100
2.	Tersedianya Aplikasi dan database pengelolaan BMD	Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100
3.	Tersedianya Aplikasi dan database pengelolaan pajak	Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100

	dan retribusi daerah				
4.	Terkoneksinya jaringan online disemua kecamatan	Kec	5	5	100
Rata-rata capaian					100

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Implemetasi software pengelolaan keuangan SKPD berbasis Informasi Teknologi adalah sebesar **100,00 %** yang berarti masuk dalam katagori capaian **Berhasil** yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja "Tersedianya Aplikasi dan database pengelolaan keuangan"

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator tersebut diatas adalah **1 Aplikasi dan 1 Database** atau 100 % dari targetnya yaitu tersedia **1 Aplikasi dan 1 Database**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Berhasil**.

Faktor kunci keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah kordinasi, komitmen serta kerjasama yang dilakukan semua pihak terkait khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam rangka mewujudkan tersedianya aplikasi dan database laporan keuangan pemerintah daerah.

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan (Penurunan)	Naik / Turun
Tahun 2018	100	0	Tetap
Tahun 2019	100	0	Tetap

2. Indikator Kinerja "Tersedianya Aplikasi dan database pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)"

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator tersebut diatas adalah tersedianya **1 Aplikasi dan 1 Database** atau 100 % dari targetnya yaitu tersedia **1 Aplikasi**

dan 1 Database. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Berhasil**.

Faktor kunci keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah kordinasi, komitmen serta kerjasama yang dilakukan semua pihak terkait khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam rangka rangka mewujudkan tersedianya aplikasi dan database laporan Barang Milik Daerah.

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan (Penurunan)	Naik / Turun
Tahun 2018	100	0	Tetap
Tahun 2019	100	0	Tetap

3. Indikator Kinerja "*Tersedianya Aplikasi dan database pengelolaan pajak dan retribusi daerah*"

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator tersebut diatas adalah tersedianya **1 Aplikasi dan 1 Database** atau 100 % dari targetnya yaitu tersedia **1 Aplikasi dan 1 Database**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Berhasil**.

Faktor kunci keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah kordinasi, komitmen serta kerjasama yang dilakukan semua pihak terkait khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam rangka rangka mewujudkan tersedianya aplikasi dan database laporan pendapatan pemerintah daerah.

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan (Penurunan)	Naik / Turun
Tahun 2018	100	0	Tetap
Tahun 2019	100	0	Tetap

4. Indikator Kinerja “Terkoneksinya jaringan online disemua kecamatan”

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator tersebut diatas adalah terkoneksi **5 kecamatan** atau 100 % dari targetnya yaitu **terkoneksinya 5 Kecamatan**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Berhasil**.

Faktor kunci keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah kordinasi, komitmen serta kerjasama yang dilakukan semua pihak terkait khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam rangka mewujudkan terkoneksinya jaringan sistem informasi untuk kecamatan yang berada di Kabupaten Sukamara.

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagi berikut :

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan (Penurunan)	Naik / Turun
Tahun 2018	100	0	Tetap
Tahun 2019	100	0	Tetap

5 Sasaran : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor PBB P2 dan BPHTB

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran tersebut adalah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada Tahun 2019 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran / Outcome	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya pendapatan PBB P2 dan BPHTB	Juta	1.000	1.754	175
2	Bertambahnya Objek Pajak dan Wajib Pajak	WP	500	471	94
Rata-rata capaian					135

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor PBB P2 dan BPHTB* adalah sebesar 135 % yang berarti masuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil** yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja “Meningkatnya pendapatan PBB P2 dan BPHTB”

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator tersebut diatas adalah sebesar Rp. 1.754.830.666 Rupiah atau 175 % dari targetnya yang sebesar Rp. 1.000.000.000. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Faktor kunci keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah kemauan, tekad dan komitmen serta kerjasama yang dilakukan semua pihak terkait khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari PBB P2 dan BPHTB.

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan (Penurunan)	Naik / Turun
Tahun 2018	768	0	Tetap
Tahun 2019	1754	986	Naik

2. Indikator Kinerja “Bertambahnya Objek Pajak dan Wajib Pajak”

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator tersebut diatas adalah sebanyak **500 Wajib Pajak** atau 94,40 % dari targetnya **471 Wajib Pajak**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Berhasil**.

Faktor kunci keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah kemauan, tekad dan komitmen serta kerjasama yang dilakukan semua pihak terkait khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam mewujudkan bertambahnya jumlah Wajib pajak sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan (Penurunan)	Naik / Turun
Tahun 2018	895	0	Tetap
Tahun 2019	471	(424)	Turun

6 **Sasaran : Peningkatan Pendapatan Pajak dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran tersebut adalah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada Tahun 2019 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran / Outcome	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Jumlah Retribusi daerah dan pajak daerah	Juta	7.817	7.747	99,10
2	Bertambahnya Objek Pajak lainnya	WP	50	41	82,00
Rata-rata capaian					90,55

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran *Peningkatan Pendapatan Pajak dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah* adalah sebesar **90,55 %** yang berarti masuk dalam katagori capaian **Berhasil** yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Indikator Kinerja “Meningkatnya Jumlah Retribusi daerah dan pajak daerah”**
Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator tersebut diatas adalah sebesar Rp.7.817.618.100,- atau 99,10 % dari target Rp.7.747.989.003 Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Berhasil**.
Faktor kunci keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah kemauan, tekad dan komitmen serta kerjasama yang dilakukan semua pihak terkait khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam rangka

melaksanakan penagihan kepada wajib pajak dan wajib retribusi telah dilaksanakan dengan optimal.

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan (Penurunan)	Naik / Turun
Tahun 2018	3.210	0	Naik
Tahun 2019	7.747	4537	Naik

2. Indikator Kinerja “Bertambahnya Objek Pajak lainnya”

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator tersebut diatas adalah sebanyak **41 Wajib Pajak** atau **82,00 %** dari targetnya sebanyak **50 Wajib Pajak**,- Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Cukup Berhasil**.

Faktor kunci keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah kemauan, tekad dan komitmen serta kerjasama yang dilakukan semua pihak terkait khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam rangka melaksanakan penagihan kepada wajib pajak dan wajib retribusi telah dilaksanakan dengan optimal.

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan (Penurunan)	Naik / Turun
Tahun 2018	54	0	Naik
Tahun 2019	41	13	Naik

7 Sasaran : Tertib Perencanaan dan Penggunaan BMD

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran tersebut adalah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada Tahun 2019 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran / Outcome	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Tersedianya Dokumen Satuan standar harga	Buku	2 Buku	2 Buku	100,00
2.	Tersedianya dokumen analisa kebutuhan barang	Dok	1 Dok	1 Dok	100,00
Rata-rata capaian					100,00

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran *Tertib Perencanaan dan Penggunaan BMD* adalah sebesar **100,00 %** yang berarti masuk dalam katagori capaian **Berhasil** yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Indikator Kinerja "*Tersedianya Dokumen Satuan standar harga*"

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator tersebut diatas adalah tersedia **2 Buku** atau 100,00 % dari targetnya yaitu tersedianya **2 buku**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Berhasil**.

Faktor kunci keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah kemauan, tekad dan komitmen serta kerjasama yang dilakukan semua pihak terkait khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam mewujudkan tersedianya dokumen Satuan Standar Harga sebagai bahan penyusunan anggaran.

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagi berikut :

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan (Penurunan)	Naik / Turun
Tahun 2018	100	0	Tetap
Tahun 2019	100	0	Tetap

2. Indikator Kinerja "*Tersedianya Dokumen analisa kebutuhan barang*"

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator tersebut diatas adalah tersedia **1 Dokumen** atau 100,00 % dari targetnya yaitu tersedianya **1 Dokumen**. Hal ini

berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Berhasil**.

Faktor kunci keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah kemauan, tekad dan komitmen serta kerjasama yang dilakukan semua pihak terkait khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam mewujudkan tersedianya dokumen analisa kebutuhan barang sebagai bahan penyusunan anggaran.

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagi berikut :

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan (Penurunan)	Naik / Turun
Tahun 2018	100	0	Tetap
Tahun 2019	100	0	Tetap

8 Sasaran : Tertib Pencatatan dan Pengamanan Aset Daerah

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran tersebut adalah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada Tahun 2019 sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Sasaran / Outcome	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah	Dok	1 Dok	1 Dok	100,00
2.	Terlaksananya penghapusan dan pemindahtanganan BMD	Keg	1 Keg	0 Keg	0
Rata-rata capaian					50,00

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Tertib Pencatatan dan Pengamanan Aset Daerah adalah sebesar **50,00 %** yang berarti masuk dalam katagori capaian **Kurang Berhasil** yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja “Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah”

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator tersebut diatas adalah sebanyak **1 Dokumen** atau 100,00 % dari targetnya yaitu tersedianya **1 Dokumen**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Berhasil**.

Faktor kunci keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah kemauan, tekad dan komitmen serta kerjasama yang dilakukan semua pihak terkait khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam mewujudkan tersedianya dokumen Barang Milik Daerah yang akurat sebagai bahan laporan.

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan (Penurunan)	Naik / Turun
Tahun 2018	100	100	Tetap
Tahun 2019	100	100	Tetap

2. Indikator Kinerja “Terlaksananya Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD”

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator tersebut diatas adalah sebanyak **0 Kegiatan** atau 0,00 % dari targetnya yaitu terlaksananya **1 Kegiatan**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Kurang Berhasil**.

Faktor ketidakberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah pada kegiatan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tidak tercapainya kerja sama dengan pihak KPKNL selaku intitusi yang melakukan penilaian terhadap barang yang akan dilelang, dikarenakan jadwal KPKNL pada tahun 2019 sangat padat sehingga untuk kabupaten sukamara pada tahun 2019 tidak terjadwalkan.

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan (Penurunan)	Naik / Turun
Tahun 2018	100	100	Tetap
Tahun 2019	0	0	Turun

7 Sasaran : Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme SDM aparatur pengelolaan keuangan

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran tersebut adalah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada Tahun 2019 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran / Outcome	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimtek, Diklat dan Sosialisasi	Orang	25 Orang	25 Orang	100,00
Rata-rata capaian					100,00

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran *Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme SDM aparatur pengelolaan keuangan* adalah sebesar **100,00 %** yang berarti masuk dalam katagori capaian **Berhasil** yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Indikator Kinerja "Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek, Diklat dan Sosialisasi"

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator tersebut diatas adalah sebesar 25 Orang atau 100,00 % dari targetnya yang sebesar 25 Orang. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Berhasil**.

Faktor keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah berminat dalam mengikuti bimbingan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme.

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Tahun	Realisasi Kinerja	Peningkatan (Penurunan)	Naik / Turun
Tahun 2018	25	100	Naik
Tahun 2019	25	100	Tetap

ANALISIS ATAS PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 mengalokasikan jumlah anggaran sebesar Rp. 23.188.978.405,35 (dua puluh tiga milyar seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah koma tiga puluh lima sen).

Data anggaran dan realisasi APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara untuk tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I.	BELANJA	23.188.978.405,35	20.197.509.694,35	87,10
	1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.684.599.919,00	7.709.089.781,35	88,77
	1) Belanja Pegawai	8.684.599.919,00	7.709.089.781,35	88,77
	2. BELANJA LANGSUNG	14.504.378.486,35	11.560.693.893,00	86,10
	1) Belanja Pegawai	5.039.252.000,00	4.272.196.500,00	84,78
	2) Belanja Barang dan Jasa	6.104.226.486,35,00	4.931.744.231,00	80,79
	3) Belanja Modal	3.360.900.000,00	3.284.479.200,00	87,10

Secara umum dari data realisasi APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara di atas yaitu **87,10 %**, dimana terjadi efisiensi anggaran pada Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar **13,90 %**.

Keberhasilan dalam efisiensi anggaran ini merupakan komitmen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara untuk lebih mengutamakan hasil capaian kinerja kegiatan, program dan sasaran yang lebih menuju kepada

peningkatan kualitas kinerja, pelayanan, efesiensi dan efektifitas baik itu dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Walaupun dalam pelaksanaan kegiatan ditahun 2019 ada sedikit kegiatan yang masih dalam kategori *berhasil, cukup berhasil dan bahkan ada yang kurang berhasil* namun secara keseluruhan untuk kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masuk kategori berhasil.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tingkat pencapaian sasaran ditetapkan dengan indikator kinerja yang merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja dimana pengukuran yang akan digunakan adalah target kinerja yang telah ditetapkan, selanjutnya pada akhir tahun dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai dan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) antara rencana dengan realisasi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang (*performance improvment*).

Pencapaian kinerja Badan sepenuhnya tidak terlepas dari dukungan, kerja keras dan motivasi dari segenap unsur yang terkait guna memenuhi sasaran yang telah ditetapkan, meskipun dalam tahun anggaran 2019 ini masih terdapat beberapa permasalahan namun itu tidak menghambat dalam pencapaian kinerja Badan.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Dengan menerapkan strategi dan kebijakan yang tepat maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara dalam mengupayakan peningkatan kinerja antara lain dengan :

1. Motivasi untuk perbaikan mutu dan kualitas kerja pegawai yang cukup tinggi hingga dapat diharapkan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;

2. Pemberdayaan SDM yang berkualitas dan mampu mengikuti perkembangan teknologi;
3. Optimalisasi sarana dan prasarana menuju penataan pembangunan yang maju dan mantap;
4. Pemenuhan standar pelayanan prima dalam bidang sarana dan prasarana kerja;
5. Pelaksanaan sistem dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan keuangan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi;
6. Penempatan SDM yang berkualitas dalam pelaksanaan dalam bidang pendapatan, aset/barang daerah dan keuangan;
7. Mengikutsertakan segenap staf untuk peningkatan kualitas dengan pelatihan, kursus dan bimbingan teknis;
8. Pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD.
9. Mengadakan sosialisasi, penyuluhan dan pekan panutan untuk menumbuhkan kembangkan kesadaran wajib pajak masyarakat.
10. Mengadakan pendaftaran dan pendataan ulang wajib pajak secara menyeluruh dan dilaksanakan secara rutin.
11. Membentuk tim khusus intensifikasi dan ekstensifikasi tingkat kabupaten guna melestarikan sumber pendapatan dan mengali potensi sumber pendapatan baru.
12. Mengadakan sensus barang / inventarisasi aset daerah secara kontinyu dan melaksanakan penilaian aset untuk mendapatkan nilai aset yang akurat.
13. Melaksanakan pelelangan barang milik daerah yang sudah tidak layak pakai guna meningkatkan pengelolaan barang milik daerah.
14. Mengadakan kajian ilmiah untuk mengetahui potensi pendapatan daerah.

15. Menyiapkan peraturan daerah dan atau keputusan kepala daerah untuk standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur dalam bidang pendapatan, aset dan keuangan daerah.
16. Mempersiapkan personil, sarana dan prasarana dalam rangka pemutakhiran data Objek Pajak dan Wajib Pajak guna peningkatan pendapatan daerah.
17. Menggunakan Teknologi Informasi guna mendukung penggunaan Sistem Informasi pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 56 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara telah menetapkan tujuan dan sasarannya yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan, yaitu :

Tujuan

1. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran

1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
2. Meningkatnya kualitas laporan pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah.
3. Meningkatnya layanan prima terhadap masyarakat atau pihak ketiga.
4. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah dilingkungan SKPD.

Pada tahun anggaran 2019, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara telah melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dengan menjalankan program dan kegiatan dengan nilai capaian masing-masing yaitu, Nilai Capaian Kinerja Program sebesar **91,35** yang termasuk kategori **Berhasil** serta Nilai Pencapaian Sasaran sebesar **97,29** yang juga termasuk dalam kategori **Berhasil**.

Meskipun pada beberapa kegiatan masih terdapat masalah namun hal itu tidak menghambat dalam pencapaian kinerja. Dengan kerja keras, kerja sama dan kemauan untuk maju serta dukungan dari segenap unsur, baik itu internal maupun eksternal, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun-tahun yang akan datang optimis untuk

mendapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sukamara.

Sukamara, Januari 2020

KEPALA BPKAD
KABUPATEN SUKAMARA



Drs. PRIHATIN SURIANSYAH
NIP. 19650719 199103 1 006

LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI TAHUN 2019
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

KEPALA BADAN
Drs. PRIHATIN SURIANSYAH
19650719 19903 1006
Pembina Utama Muda (IV/c)



Pelaksana / Tenaga Kontrak ELVA FEBRIANI, S.Psi RANDIKA FEBRIANTO	Kasubid Penetapan dan Perhitungan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya 1970615 200312 1 010 Penata Tk. I (II/c)	Analisis Perencanaan Anggaran TRIFONO NIP. 1981047 200504 1 011 Penata Muda (III/a)	Verifikator Keuangan NISAH IMALIA, A.Md NIP. 1981010 20101 2 005 Penata Muda (III/a)	Analisis Standar Harga REINHARD STEPRI, A.Md NIP. 19840522 20101 1 002 Penata Muda (III/a)
Kasubid Penetapan dan Perhitungan PBB & BPHTB PERAWATY SIMANUNTAK, SE 19800311 201001 2 003 Penata (III/c)	Pelaksana / Tenaga Kontrak PRISMA LALONG SASANDI, A. Md ALDY FAULA, A.Md.KG	Analisis Perencanaan Anggaran WAHYUNI, SE NIP. 19790321 200903 2 022 (III/a)	Pelaksana / Tenaga Kontrak ZAINI MELINA NIRMADYATI, SE	PIT, Kasubid Inventarisasi dan Pencatatan Aset JIMMY KRISDIPTI, SE NIP. 19860711 201001 1 002 Penata (III/c)
Kasubid Verifikasi dan Penagihan Piutang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya FLORIDA M. GULTON, SE 19850518 201001 2 005 Penata (III/c)	Kasubid Verifikasi dan Penagihan Piutang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya FLORIDA M. GULTON, SE 19850518 201001 2 005 Penata (III/c)	Kasubid Pembiayaan JOKO MIKULISHIN, A. Md NIP. 19760609 200312 1 007 Penata (III/c)	Kasubid Kas Daerah DHARMA TASHIH, SE NIP. 19760422 201001 2 001 Penata (III/c)	Penyusun Keutuhan Barang Inventaris I NYOMAN GEDE ANTONI, SE NIP. 19770511 201001 1 005 Penata (III/c)
Pengadministrasi Penerimaan ZAINAL ARIFIN 19790910 200504 1 033 Pengatur Tk. I	Pelaksana / Tenaga Kontrak WISUDANA SYAFRI FATALLAH	Verifikator Keuangan GUSTI RENDI HARIANA, A. Md NIP. 19790524 200604 2 015 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubid Dana Transfer RIA ROMANTIR, SJP NIP. 19831013 200501 2 006 Penata (III/c)	Pelaksana / Tenaga Kontrak SUWARDI YUDHA SAPUTRA
Pelaksana / Tenaga Kontrak SAM'SUL ARIFIN	Juru Pungut Retribusi ARBAIN 19681012 201212 1 002 Juru Tk. I (I/c)	Pengelola Keuangan JERIAN SYAH NIP. 19830821 200604 1 004 Pengatur (III/c)	Pengelola Dana Administrasi dan Verifikasi DEDDY SUMARJANA NIP. 1980924 200604 1 015 Pengatur Tk. I (II/c)	KEPALA SUBBIDJANG PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN ASET ERICK SABATI, ST NIP. 19770217 200312 1 004 Penata Tk. I (III/d)
	Kasubid Pengelolaan Gaji DEDY HERLAMBANG, SE NIP. 19680409 200604 1 013 Penata Tk. I (III/d)			Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah R. RONI KUSUMA DILA AGA NIP. 19750713 200604 1 007 Pengatur Tk. I (II/d)
	Pengelola Gaji TAJRIK NIP. 19841128 200604 1 006 Pengatur Tk. I (II/d)			Penyusun Rencana Kasi, Telaahan Usul Pencapaian Barano IDRIUS NIP. 19760507 200604 1 015 Pengatur (III/c)

UPTB

Kasubid Akuntansi dan Pelaporan EKA PASSIRAH SARIE, SE NIP. 19850526 200902 2 002 Penata Tk. I (III/d)	Penyusun Laporan Keuangan DANNY BUNGARAN S, SE NIP. 1986008 201001 1 003 Penata Muda (III/a)	Penyusun Laporan Keuangan ABDUL MALIK, A.Md NIP. 19820817 201001 1 003 Penata Muda (III/a)	Pengelola Laporan Keuangan HARIOONO NIP. 19760705 201212 1 002 Pengatur Muda Tk. I (II/b)
KEPALA SUBBIDJANG PEMERINAH AKUNTANSI PUTRI BESTARI, SE NIP. 19851216 201001 2 003 Penata (III/c)			

LAMPIRAN 2

PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2019
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2019

Program	Uraian	Kegiatan				Presentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana Lokasi Output : Telepon Faksimile Listrik Outcome : Tersedianya sarana listrik, telepon dan faksimile Benefit : Lancarnya pelaksanaan tugas dan fungsi dinas Impact : Meningkatnya kinerja aparatur	Rp Kabupaten line unit kwh	283.400.000,00 1 3 1 66000	265.600.788,00 1 3 1 66000	93,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	92,93%
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Lokasi Output : Pajak Kendaraan/STNK Outcome : Tertibnya administrasi kendaraan Benefit : Lancarnya pelaksanaan tugas dan fungsi dinas Impact : Tertibnya administrasi	Rp kabupaten buah ls	10.200.000,00 1 20 1	1.533.300,00 1 2 1	15,03% 100,00% 10,00% 100,00%	
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input : Dana Lokasi SDM Output : PNS, Biaya Giro dan Cheque Outcome : Tersedianya Jasa Administrasi dan honorarium Benefit : Lancarnya pelaksanaan tugas Impact : Meningkatnya kinerja aparatur	Rp kabupaten org org org	470.950.000,00 1 2 50 50	440.900.000,00 1 2 50 50	93,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana Lokasi SDM Output : Peralatan dan Bahan Kebersihan Outcome : Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor Benefit : Terjaganya kebersihan dan ruangan dan halaman kantor Impact : Memberikan kenyamanan dan anggungan kantor	Rp kabupaten org paket paket	21.000.000,00 1 3 1 1	19.459.200,00 1 3 1 1	92,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana Lokasi Output : Alat Tulis Kantor Outcome : Tersedianya Alat Tulis Kantor Benefit : Lancarnya pelaksanaan tugas Impact : Meningkatnya kinerja aparatur	Rp kabupaten paket paket	100.000.000,00 1 1 1	100.000.000,00 1 1 1	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	100,00%
	6 Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Input : Dana Lokasi Output : Barang Cetak, Dokumen Outcome : Tersedianya Dokumen Dan Barang Cetak Kantor Benefit : Lancarnya pelaksanaan tugas dan fungsi dinas Impact : Meningkatnya kinerja aparatur	Rp kabupaten paket paket	130.725.000,00 1 1 1	128.495.200,00 1 1 1	98,29% 100,00% 100,00% 100,00%	

Program	Uraian	Kegiatan				Presentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Ransman Kantor	Input : Dana Lokasi Output : Peralatan dan Penerangan Kantor Outcome : Tersedianya peralatan penerangan Benefit : Lancarnya pelaksanaan tugas dan fungsi dinas Impact : Meningkatnya kinerja aparatur	Rp kabupaten paket paket	30.000.000,00 1 1 1	28.528.000,00 1 1 1	95,09% 100,00% 100,00% 100,00%	98,77%
	8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input : Dana Lokasi SDM Output : Peralatan Rumah Tangga Outcome : Tersedianya Peralatan Rumah Benefit : Lancarnya pelaksanaan tugas dan fungsi dinas Impact : Meningkatnya kinerja aparatur	Rp kabupaten org paket paket	8.688.000,00 1 2 1 1	8.130.000,00 1 2 1 1	93,58% 100,00% 100,00% 100,00%	
	9 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-	Input : Dana Lokasi SDM Output : Koran dan Majalah Outcome : Tersedianya Koran buku peraturan Benefit : Meningkatnya pengetahuan PNS Impact : Menampan pengetahuan PNS	Rp kabupaten org Eksemplar Eksemplar	14.040.000,00 1 2 3 3	14.040.000,00 1 2 3 3	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
	10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input : Dana Lokasi Output : BBM, Suku Cadang Pemeliharaan Potong Rumput Outcome : Tersedianya BBM, Peralatan Mesin rumput Benefit : Terpelihara genset dan mesin Impact : Lingkungan kantor yang asri	Rp kabupaten thn thn	13.600.000,00 1 1 1	11.200.000 1 1 1	82,35% 100,00% 100,00% 100,00%	95,59%
	11 Penyediaan Makanan Dan Minuman	Input : Dana Lokasi SDM Output : Makanan Dan Minuman Outcome : Tersedianya Makanan Minuman Benefit : Lancarnya pelaksanaan Tugas Impact : Tersedianya makanan minuman	Rp kabupaten org org org	123.660.000,00 1 2 31 31	105.940.000,00 1 2 31 31	85,67% 100,00% 100,00% 100,00%	
	12 Rapat - rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Input : Dana Lokasi SDM Output : Perjalanan Dinas Luar Daerah Outcome : Kordinasi Dan Sinkronisasi Benefit : Lancarnya pelaksanaan tugas dan Impact : Meningkatnya kinerja Aparatur	Rp provinsi org thn thn	1.469.164.186,35 1 51 1 1	1.437.389.149,00 1 51 1 1	97,84% 100,00% 100,00% 100,00%	
	13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Kegiatan (honor daerah)	Input : Dana Lokasi SDM Output : Tersedia Tenaga Pendukung Outcome : Tersedia Tenaga Pendukung Benefit : Lancarnya pelaksanaan tugas Impact : Meningkatnya kinerja dan	Rp kabupaten org org org	676.320.000,00 1 3 31 31	658.053.200,00 1 3 31 31	97,30% 100,00% 100,00% 100,00%	

Program	Uraian	Kegiatan				Presentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	14 Fasilitasi Kegiatan, Rapat-rapat, Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	Input : Dana Lokasi SDM Output : Perjalanan dinas dalam daerah Outcome : Terjalannya koordinasi dalam Benefit : Lancarnya pelaksanaan tugas dan fungsi dinas Impact : Meningkatnya kinerja aparatur	Rp kabupaten org thn thn	40.000.000,00 1 51 1 1	35.675.000,00 1 51 1 1	89,19% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	90,61%
	1 Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana Lokasi Output : Ruang Lobby, WC Aula , instalasi Outcome : Ruang Lobby, WC Aula , instalasi Benefit : Lancarnya pelaksanaan tugas Impact : meningkatkan kinerja aan	Rp kabupaten paket paket	348.200.000,00 1 3 3	345.606.000,00 1 3 3	99,26% 100,00% 100,00% 100,00%	99,81%
	2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Lokasi Output : Kendaraan dinas Outcome : tersedianya kendaraan dinas Sekretaris dan operasional Benefit : lancarnya pelaksanaan tugas Impact : meningkatkan kinerja	Rp kabupaten paket paket	613.000.000,00 1 2 2	594.211.200,00 1 2 2	96,93% 100,00% 100,00% 100,00%	99,23%
	3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana Lokasi Output : Peralatan dan Perlengkapan Kantor Outcome : Tersedianya Peralatan dan Kantor yang memadai Benefit : lancarnya pelaksanaan tugas Impact : meningkatkan kinerja	Rp kabupaten paket paket	396.500.000,00 1 25 25	371.235.000,00 1 25 25	93,63% 100,00% 100,00% 100,00%	98,41%
	4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Input : Dana Lokasi Output : Pemeliharaan Gedung Kantor outcome : Terpelihara Kondisi Gedung Kantor Benefit : Lancarnya pelaksanaan tugas dan fungsi dinas Impact : Meningkatnya kinerja aparatur	Rp kabupaten thn thn	101.000.000,00 1 1 1	95.920.000,00 1 1 1	94,97% 100,00% 100,00% 100,00%	98,74%
	5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana Lokasi Output Pemeliharaan Kendaraan Dinas Outcome Terpelihara Kendaraan Dinas Benefit : Lancarnya pelaksanaan tugas dan fungsi dinas Impact : Meningkatnya kinerja aparatur	Rp kabupaten unit unit	211.760.000,00 1 20 20	167.350.800,00 1 20 20	79,03% 100,00% 100,00% 100,00%	94,76%
	6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung kantor	Input : Dana Lokasi Output Pemeliharaan peralatan kantor outcome Terpelihara peralatan kantor Benefit : Lancarnya pelaksanaan tugas dan fungsi dinas Impact : Meningkatnya kinerja aparatur	Rp kabupaten thn thn	98.100.000,00 1 1 1	79.055.000,00 1 1 1	80,59% 100,00% 100,00% 100,00%	95,15%

Program	Uraian	Kegiatan				Presentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Input					
		Dana	Rp	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00%	100,00%
		Lokasi	kabupaten	1	1	100,00%	
		SDM	org	65	65	100,00%	
		Output :					
		Pakaian Dinas Aparatur	ls	1	1	100,00%	
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Outcome :					
		Tertibnya aparatur menggunakan	ls	1	1	100,00%	99,63%
		Benefit :					
		Seragamnya pakaian dinas aparatur					
		Impact :					
		Meningkatnya kinerja aparatur					
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Input					
		Dana	Rp	17.800.000,00	16.790.000,00	94,33%	100,00%
		Lokasi	kabupaten	1	1	100,00%	
		SDM	org	2	2	100,00%	
		Output :					
		Laporan Realisasi Anggaran	Laporan	12	12	100,00%	
	2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Outcome :					
		tersedia laporan TEPEA	Laporan	12	12	100,00%	100,00%
		Benefit :					
		Lancarnya Pelaksanaan Tugas dan					
		Impact :					
		terusnya pelaporan reansasi					
	3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input					
		Dana	Rp	11.400.000,00	11.384.900,00	99,87%	100,00%
		Lokasi	kabupaten	1	1	100,00%	
		SDM	org	2	2	100,00%	
		Output :					
		Laporan Keuangan Semesteran	buku	2	2	100,00%	
	1 Penyusunan Standar Satuan Harga	Outcome :					
		Tersedianya Laporan Semesteran	buku	2	2	100,00%	99,13%
		Benefit :					
		Lancarnya Pelaksanaan Tugas dan					
		Impact :					
		terusnya pelaporan keuangan					
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Penyusunan RAPERDA Tentang APBD	Input					
		Dana	Rp	792.650.000,00	647.582.400,00	81,70%	95,42%
		Lokasi	kabupaten	1	1	100,00%	
		Output :					
		Rancangan Peraturan Daerah APBD	buku	1	1	100,00%	
		Outcome :					
	1 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya PERDA Tentang APBD	buku	1	1	100,00%	100,00%
		Benefit :					
		Lancarnya Pelaksanaan Tugas Dan Dinas					
		Impact :					
		Meningkatnya Kinerja Aparatur					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
		Impact :					
	1 Pedidikan Dan Pelatihan Formal	Impact :	</				

Program	Uraian	Kegiatan				Presentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Perubahan APBD	Input : Dana Lokasi Output : Rancangan Peraturan Daerah KDH Outcome : Tersedianya Rancangan PERDA Benefit : Lancarnya Pelaksanaan Tugas Dan Impact : meningkatkan kinerja Aparatur	Rp kabupaten buku buku	27.225.000,00 1 1 1	14.046.700,00 1 1 1	51,59% 100,00% 100,00% 100,00%	68,45%
	4 Penyusunan RAPERDA Tentang Perubahan APBD	Input : Dana Lokasi SDM Output : Rancangan Peraturan Daerah Outcome : Tersedia Rancangan Peraturan Benefit : Tersedianya peraturan daerah Impact : tertibnya pengelolaan keuangan	Rp kabupaten org buku buku	637.625.000,00 1 7 1 1	539.015.500,00 1 7 1 1	84,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	96,91%
	5 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Input : Dana Lokasi SDM Output : Rancangan Peraturan Daerah KDH Outcome : Tersedia PERDA KDH Benefit : Lancarnya Pelaksanaan Tugas Dan Impact : meningkatkan kinerja Aparatur	Rp kabupaten org buku buku	27.225.000,00 1 4 1 1	13.160.500,00 1 4 1 1	48,34% 100,00% 100,00% 100,00%	89,67%
	6 Penyusunan RAPERDA Tentang Pertanggungjawaban	Input : Dana Lokasi Output : Rancangan Peraturan Daerah Outcome : Tersedia Peraturan Daerah Benefit : Lancarnya Pelaksanaan Tugas Dan Impact : meningkatkan kinerja Aparatur	Rp kabupaten buku buku	83.947.000,00 1 1 1	68.955.500,00 1 1 1	82,14% 100,00% 100,00%	95,54%
	7 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Input : Dana Lokasi SDM Output : Rancangan Peraturan Daerah Outcome : Tersedianya Rancangan Peraturan Benefit : Lancarnya Pelaksanaan Tugas Dan Impact : meningkatkan kinerja Aparatur	Rp kabupaten org buku buku	15.672.000,00 1 4 1 1	12.372.000,00 1 4 1 1	78,94% 100,00% 100,00% 100,00%	95,79%
	8 Penunjang Operasional Administrasi Bantuan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan	Input : Dana Lokasi Output : Penunjang operasional PPKD Outcome : Penunjang operasional PPKD Benefit : Lancarnya pelaksanaan tugas PPKD Impact : meningkatkan kinerja Aparatur	Rp kabupaten thn thn	70.600.000,00 1 1 1	37.030.300,00 1 1 1	52,45% 100,00% 100,00% 100,00%	88,11%
	9 Pengelolaan Dan Pengadaan Aset/Barang Daerah Dan Investasi Daerah	Input : Dana Lokasi SDM Output : Peralatan Mess Pemda Outcome : Terpelihara aset daerah Benefit : Terpelihara aset daerah Impact : bertambahnya investasi dan aset	Rp kabupaten org thn thn	2.579.550.000,00 1 4 1 1	2.514.845.238,00 1 4 1 1	97,49% 100,00% 100,00% 100,00%	99,50%

Program	Uraian	Kegiatan				Presentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
	10 Penyusunan Laporan Semester & Prognosis Untuk 6 (Enam) bulan ke depan	Input : Dana Lokasi Output : Laporan semester dan prognosis Outcome : Laporan semester dan prognosis Benefit : Tersedianya laporan semester dan prognosis Impact : Mempercepat laporan keuangan daerah	Rp kabupaten buku buku	2.810.000,00 1 1 1	2.798.000 1 1 1	99,57% 100,00% 100,00% 100,00%	99,89%
	11 Penatausahaan Keuangan Bendahara Umum Daerah	Input : Dana Lokasi Output : Rekonsiliasi kas daerah Outcome : Hasil rekonsiliasi kas daerah Benefit : Tersedianya data kas daerah Impact : Berturnya penatausahaan keuangan	Rp kabupaten Laporan Laporan	376.502.000,00 1 2 2	369.305.700,00 1 2 2	98,09% 100,00% 100,00% 100,00%	99,52%
	12 Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Input : Dana Lokasi Output : Sistem informasi pengelolaan Outcome : Sistem informasi pengelolaan Benefit : Lancarnya pengelolaan keuangan Impact : Meningkatkan kinerja aparatur	Rp kabupaten thn thn	532.480.000,00 1 1 1	453.626.700,00 1 1 1	85,19% 100,00% 100,00% 100,00%	96,30%
	13 Peningkatan Pemungutan PBB	Input : Dana Lokasi Output : Pekan panutan PBB, pendataan OP Outcome : Pekan panutan PBB Benefit : Meningkatkan kesadaran Impact : Meningkatkan pendapatan PBB	Rp kabupaten thn thn	799.985.000,00 1 1 1	404.044.000,00 1 1 1	50,51% 100,00% 100,00% 100,00%	87,63%
	14 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Input : Dana Lokasi Output : Cetak Spanduk dan X Banner Outcome : Spanduk dan X Banner Benefit : Impact : Meningkatnya pendapatan asn	Rp kabupaten thn thn	201.225.000,00 1 100 100	170.774.500,00 1 100 100	84,87% 100,00% 100,00% 100,00%	96,22%
	15 Pengelolaan Kas Daerah	Input : Dana Lokasi SDM Output : Terlaksananya rekon kas daerah Outcome : Sinkronnya kas daerah Benefit : Tertib dan sinkronnya kas daerah Impact : Tertib dan sinkronnya kas daerah	Rp kabupaten org thn thn	128.400.000,00 1 3 1 1	126.406.400,00 1 3 1 1	98,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	99,69%
	16 Pengelolaan Administrasi Gaji Pegawai	Input : Dana Lokasi SDM Output : Tersedianya sistem aplikasi gaji Outcome : Aplikasi gaji PNS Benefit : Tertatanya sistem penggajian PNS Impact : Sistem penggajian yang semakin tertata dengan aplikasi	Rp kabupaten org thn thn	57.550.000,00 1 3 1 1	35.239.700,00 1 3 1 1	61,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	87,08%

Program	Uraian	Kegiatan				Presentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
	17 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan	Input : Dana Lokasi SDM Output : Sosialisasi tentang pengelolaan Outcome : Pengetahuan Penyusunan Laporan Benefit : Laporan Keuangan Pemerintah Impact : Laporan keuangan sesuai	Rp kabupaten org Kali buku	80.725.000,00 1 4 4 4	35.239.700,00 1 4 2 2	43,65% 100,00% 100,00% 50,00% 50,00%	68,73%
	18 Pengkajian Kebijakan Anggaran Belanja Daerah	Input : Dana Lokasi SDM Output : Perbub, Perda dan Keputusan Outcome : Payung Hukum Kebijakan Belanja Benefit : Tertibnya Pelaksanaan Kebijakan Impact : Kebijakan belanja Daerah sesuai	Rp kabupaten org Buku buku	390.200.000,00 1 4 2 2	22.350.000,00 1 4 0 0	5,73% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%	41,15%
	19 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Input : Dana Lokasi Output : Laporan Keuangan Pemerintah Outcome : Opini Laporan Keuangan WTP Benefit : Tertatanya sistem pelaporan Impact : Pengelolaan keuangan daerah sesuai	Rp kabupaten kab kab	171.360.000,00 1 1 1	168.300.000,00 1 1 1	98,21% 100,00% 100,00% 100,00%	99,55%
	20 Rekonsiliasi Data Penerimaan Kabupaten	Input : Dana Lokasi Output : data penerimaan Outcome : laporan penerimaan daerah Benefit : Tertib dan sinkronnya data Impact : tertib dan sinkronnya kas daerah	Rp kabupaten thn thn	4.200.000,00 1 1 1	3.900.000,00 1 1 1	92,86% 100,00% 100,00% 100,00%	98,21%
	21 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Input : Dana Lokasi Output : Laporan Keuangan SOPD Outcome : Laporan Keuangan sesuai SAP Benefit : Tersedianya Laporan sesuai SAP Impact : Opini Laporan keuangan WTP	Rp kabupaten thn thn	456.750.000,00 1 1 1	452.051.700,00 1 1 1	98,97% 100,00% 100,00% 100,00%	99,74%
	22 Pengelolaan Dana Transfer	Input : Dana Lokasi Output : Dana Transfer Outcome : Pengelolaan Dana Daerah Benefit : Sesuai nya Pengelolaan dana daerah Impact : Laporan dana transfer	Rp kabupaten thn thn	212.100.000,00 1 1 1	115.950.200,00 1 1 1	54,67% 100,00% 100,00%	88,67%
	23 Pengolahan data penerimaan pendapatan asli daerah	Input : Dana Lokasi Output : Dokumen Data Realisasi Outcome : Tersedia Laporan Realisasi PAD Benefit : Tertib Laporan Realisasi PAD Impact : Laporan keuangan PAUD	Rp kabupaten thn thn	36.575.000,00 1 1 1	21.844.700,00 1 1 1	59,73% 100,00% 100,00% 100,00%	89,93%

Program	Uraian	Kegiatan				Presentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
	24 Pendaftaran wajib Pajak dan Wajib Retribusi	Input : Dana Lokasi Output : pendaftaran, perhitungan dan Penetapan Outcome : Data Wajib Pajak Benefit : Pelayanan Pendaftaran Impact : Meningkat PAU	Rp kabupaten thn thn	86.496.000,00 1 1 1	48.490.700,00 1 1 1	56,06% 100,00% 100,00% 100,00%	89,02%
	25 Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya	Input : Dana Lokasi Output : Penagihan Retribusi daerah Outcome : data penagihan Benefit : penerimaan retribusi Impact : Peningkatan PAU	Rp kabupaten thn thn	61.999.500,00 1 1 1	60.052.000,00 1 1 1	96,86% 100,00% 100,00% 100,00%	99,21%
	26 Pelayanan dan Pengadministrasian benda berharga	Input : Dana Lokasi Output : Perforasi Benda berharga Outcome : terlayani benda berharga Benefit : Legalisasi benda berharga Impact : Peningkatan PAU	Rp kabupaten thn thn	175.025.000,00 1 1 1	151.183.500,00 1 1 1	86,38% 100,00% 100,00% 100,00%	96,59%
7. Program Peningkatan Penyeimbangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	1 Rekonsiliasi Data Aset Belanja Modal	Input : Dana Lokasi Output : data Outcome : tersedianya data aset daerah Benefit : tertib dan sinkronnya data aset Impact : tertib dan sinkronnya data aset	Rp kabupaten kab kab	277.100.000,00 1 1 1	266.340.400,00 1 1 1	96,12% 100,00% 100,00% 100,00%	99,03%
	2 Revaluasi/Apraisal Aset/Barang Daerah	Input : Dana Lokasi SDM Output : Penyusunan laporan Penyusutan Outcome : Tertibnya pengelolaan aset daerah Benefit : Tertatanya sistem pengelolaan aset Impact : tertatanya sistem pengelolaan aset	Rp kabupaten org keg kabupaten	105.650.000,00 1 1 1	4.500.000,00 1 0 0	4,26% 100,00% 0,00% 0,00%	26,06%
	3 Pengamanan Aset Pemerintah Daerah	Input : Dana Lokasi SDM Output : Pengamanan aset Outcome : tersedianya data aset Benefit : aman dan terjaminnya aset daerah Impact : aman dan terjaminnya aset daerah	Rp kabupaten org kabupaten kabupaten	233.620.000,00 1 1 1	142.802.600,00 1 1 1	61,13% 100,00% 100,00% 100,00%	90,28%

Program	Uraian	Kegiatan				Presentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Input : Dana Lokasi SDM Output : Rapat Evaluasi Outcome : Tertibnya pengelolaan aset daerah Benefit : Tertatanya sistem pengelolaan aset Impact : Pengelolaan aset daerah	Rp kabupaten org keg kabupaten	18.730.000,00 1 4 1	0,00 0 0	0,00% 0,00% 0,00%	0,00%
	5 Penghapusan Barang Milik	Input : Dana Lokasi SDM Output : Penyusutan BMD Outcome : Tertibnya pengelolaan aset daerah Benefit : Tertatanya sistem pengelolaan aset Impact : Pengelolaan aset daerah	Rp kabupaten org keg kabupaten	327.350.000 1 1 1	317.045.000,00 1 1 1	96,85% 100,00% 100,00% 100,00%	99,21%
Total Capaian Kinerja Program (Jumlah Persentase capaian Kegiatan dibagi jumlah kegiatan)							91,35%

LAMPIRAN 3

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2019**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat keterpaduan program kegiatan APBD untuk pencapaian RPJMD	- Tersedianya dokumen kebijakan APBD dan perubahan APBD - Tersedianya raperda tentang APBD dan perubahan APBD - Tersedianya raperda tentang laporan pertanggungjawaban APBD - Tersedianya Peraturan Bupati tentang Laporan Penjabaran Pertanggungjawaban APBD - Penatausahaan dokumen SPM dan SP2D cepat tepat dan murah - Tersedianya Dokumen data laporan penerimaan dan pengeluaran belanja - Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Jumlah SKPD yang membuat laporan keuangan sesuai dengan SAP dan tepat waktu menyerahkan laporan keuangan	1 Buku APBD Tanggal 31 Desember 2019 1 Buku APBDP Tanggal 31 September 2019 1 Buku Raperda APBD 1 Buku Raperda APBDP 1 Buku RAPERDA 1 Buku PERBUB - Jumlah SP2D diterbitkan dalam waktu 2 hari dan sesuai dengan yang telah di anggarkan 1 Laporan Penerimaan Daerah 1 Laporan Pengeluaran Daerah - WTP 30 SKPD 30 LAPORAN	- Tersedia - Tersedia - Tersedia - Tersedia 2 Hari - Tersedia - WTP 30 SKPD 30 LAPORAN	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2	Tingkat tertib administrasi keuangan	- Adanya sistem informasi dan database pengelolaan keuangan - Adanya sistem informasi dan database pengelolaan BMD - Adanya sistem informasi dan database tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah - Terkoneksinya jaringan online kabupaten sukamara - Meningkatnya Pendapatan dari PBB dan BPHTB - Bertambah Objek Pajak dan Wajib Pajak	1 Aplikasi SIMDA Keuangan 1 Database Keuangan 1 Aplikasi SIMDA BMD 1 Database BMD 1 Aplikasi SIMPADA dan 1 Database 1 Aplikasi SIMDA Pendapatan dan 1 Database - Terkoneksi 5 Kecamatan - Rp. 1.000.000.000.000 500 WP	- Tersedia - Tersedia - Tersedia - Tersedia - Terkoneksi - Rp 1.754.830.666,00 471 WP	100% 100% 100% 100% 100% 175% 94,40%
3	Tingkat tertib pelaporan keuangan sesuai SAP	- Adanya sistem informasi dan database pengelolaan keuangan - Adanya sistem informasi dan database pengelolaan BMD - Adanya sistem informasi dan database tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah - Terkoneksinya jaringan online kabupaten sukamara - Meningkatnya Pendapatan dari PBB dan BPHTB - Bertambah Objek Pajak dan Wajib Pajak	1 Aplikasi SIMDA Keuangan 1 Database Keuangan 1 Aplikasi SIMDA BMD 1 Database BMD 1 Aplikasi SIMPADA dan 1 Database 1 Aplikasi SIMDA Pendapatan dan 1 Database - Terkoneksi 5 Kecamatan - Rp. 1.000.000.000.000 500 WP	- Tersedia - Tersedia - Tersedia - Tersedia - Terkoneksi - Rp 1.754.830.666,00 471 WP	100% 100% 100% 100% 100% 175% 94,40%
4	Implementasi software pengelolaan keuangan SOPD berbasis IT	- Adanya sistem informasi dan database pengelolaan keuangan - Adanya sistem informasi dan database pengelolaan BMD - Adanya sistem informasi dan database tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah - Terkoneksinya jaringan online kabupaten sukamara - Meningkatnya Pendapatan dari PBB dan BPHTB - Bertambah Objek Pajak dan Wajib Pajak	1 Aplikasi SIMDA Keuangan 1 Database Keuangan 1 Aplikasi SIMDA BMD 1 Database BMD 1 Aplikasi SIMPADA dan 1 Database 1 Aplikasi SIMDA Pendapatan dan 1 Database - Terkoneksi 5 Kecamatan - Rp. 1.000.000.000.000 500 WP	- Tersedia - Tersedia - Tersedia - Tersedia - Terkoneksi - Rp 1.754.830.666,00 471 WP	100% 100% 100% 100% 100% 175% 94,40%
5	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari PBB P2 dan BPHTB	- Adanya sistem informasi dan database pengelolaan keuangan - Adanya sistem informasi dan database pengelolaan BMD - Adanya sistem informasi dan database tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah - Terkoneksinya jaringan online kabupaten sukamara - Meningkatnya Pendapatan dari PBB dan BPHTB - Bertambah Objek Pajak dan Wajib Pajak	1 Aplikasi SIMDA Keuangan 1 Database Keuangan 1 Aplikasi SIMDA BMD 1 Database BMD 1 Aplikasi SIMPADA dan 1 Database 1 Aplikasi SIMDA Pendapatan dan 1 Database - Terkoneksi 5 Kecamatan - Rp. 1.000.000.000.000 500 WP	- Tersedia - Tersedia - Tersedia - Tersedia - Terkoneksi - Rp 1.754.830.666,00 471 WP	100% 100% 100% 100% 100% 175% 94,40%

6	Peningkatan pajak dan pendapatan terhadap pendapatan Asli Daerah	- Meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah	- Rp. 7.817.617.100	Rp	7.747.989.003,00	99,10%
7	Tertib Perencanaan dan Penggunaan BMD	- Bertambah Objek retribusi daerah dan objek pajak lainnya - Tersedianya dokumen satuan standar harga - Tersedianya dokumen analisa kebutuhan barang	- 50 WP / Tahun - 2 SK dan 2 Dokumen - 1 Dokumen	41 WP	Tersedia	82%
8	Tertib Pencatatan dan Pengamanan Aset Daerah	- Tersedianya dokumen pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD - Terlaksananya penghapusan dan pemindahtanganan aset	- 1 Laporan - Terlaksana lelang BMD 400 Jt Rupiah - Terlaksananya Penghapusan BMD	Tersedia	Tersedia	100%
9	Tingkat kemampuan dan profesionalisme SDM aparatur pengelolaan keuangan	- Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bintek, pelatihan dan sosialisasi	- 25 Orang	Tidak terlaksana	25 Orang	0%
						100%

LAMPIRAN 4

EVALUASI KINERJA KEGIATAN

**EVALUASI KINERJA KEGIATAN
BADAN PENGELOLAAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2019**

Program	Uraian	Kelompok Indikator Kinerja	Capaian Kelompok Indikator Kinerja	Bobot Kelompok Indikator Kinerja	Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Input	85,85	20	17,17
		Output	100	30	30,00
		Outcome	100	50	50,00
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 1			97,17
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input	28,94	20	5,79
		Output	100	30	30,00
		Outcome	100	50	50,00
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 2			85,79
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input	91,36	20	18,27
		Output	100	30	30,00
		Outcome	100	50	50,00
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 3			98,27
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input	99,89	20	19,98
		Output	100	30	30,00
		Outcome	100	50	50,00
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 4			99,98
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input	100,00	20	20,00
		Output	100	30	30,00
		Outcome	100	50	50,00
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 5			100,00
	6. Penyediaan Barang Cetak Dan pengandaan	Input	99,85	20	19,97
		Output	100	30	30,00
		Outcome	100	50	50,00
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 6			99,97
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input	100	20	20,00
		Output	100	30	30,00
		Outcome	100	50	50,00
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 7			100,00

Program	Uraian	Kelompok Indikator Kinerja	Capaian Kelompok Indikator Kinerja	Bobot Kelompok Indikator Kinerja	Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6
	8. Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Input			
		Output	88,87	20	17,77
		Outcome	100	30	30,00
			100	50	50,00
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 8			97,77
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Input			
		Output	100	20	20,00
		Outcome	100	30	30,00
			100	50	50,00
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 9			100,00
	10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input			
		Output	63,45	20	12,69
		Outcome	100	30	30,00
			100	50	50,00
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 10			92,69
	11. Penyediaan Makanan Dan Minuman	Input			
		Output	93,19	20	18,64
		Outcome	100	30	30,00
			100	50	50,00
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 11			98,64
	12. Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Input			
		Output	99,96	20	19,99
		Outcome	100	30	30,00
			100	50	50,00
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 12			99,99
	13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Dan Kegiatan (Honor Kegiatan)	Input			
		Output	98,85	20	19,77
		Outcome	100	30	30,00
			100	50	50,00
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 13			99,77
2. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	14. Fasilitas Kegiatan, Rapat-Rapat, Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	Input			
		Output	71,83	20	14,37
		Outcome	100	30	30,00
			100	50	50,00
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 14			94,37
	1. Pembangunan Gedung Kantor	Input			
		Output	99,76	20	19,95
		Outcome	100	30	30,00
			100	50	50,00
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 1			99,95
	2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input			
		Output	99,76	20	19,95
		Outcome	100	30	30,00
			100	50	50,00
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 1			99,95

Program	Uraian	Kelompok Indikator Kinerja	Capaian Kelompok Indikator Kinerja	Bobot Kelompok Indikator Kinerja	Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja	
1	2	3	4	5	6	
	2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input	97,99 100 100	20	19,60	
		Output		30	30,00	
		Outcome		50	50,00	
	Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 2					99,60
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input	94,51 100 100	20	18,90	
		Output		30	30,00	
		Outcome		50	50,00	
	Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 3					98,90
	4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Input	65,10 100 100	20	13,02	
		Output		30	30,00	
		Outcome		50	50,00	
	Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 4					93,02
	5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input	93,76 100 100	20	18,75	
		Output		30	30,00	
		Outcome		50	50,00	
Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 5					98,75	
3. Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input	100,00	20	20,00	
		Output	100	30	30,00	
		Outcome	100	50	50,00	
Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 1					100,00	
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input	98,89 100 100	20	19,78	
		Output		30	30,00	
		Outcome		50	50,00	
	Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 1					99,78
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Input	100,00 100 100	20	20,00	
		Output		30	30,00	
		Outcome		50	50,00	
	Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 1					100,00
	2. Penyusunan Pelaporan Semesteran	Input	100,00 100 100	20	20,00	
		Output		30	30,00	
		Outcome		50	50,00	
	Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 1					100,00
	3. Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	Input	100,00 100 100	20	20,00	
		Output		30	30,00	
		Outcome		50	50,00	
Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 2					100,00	

Program	Uraian	Kelompok Indikator Kinerja			Capaian Kelompok Indikator Kinerja			Bobot Kelompok Indikator Kinerja			Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja		
		3			4			5			6		
1	2												
6. Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan Standar Satuan Harga	Input			57,38			20			11,48		
		Output			100			30			30,00		
		Outcome			100			50			50,00		
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 1						91,48					
	2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Input			73,46			20			14,69		
		Output			100			30			30,00		
		Outcome			100			50			50,00		
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 2						94,69					
	3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Input			36,9			20			7,38		
		Output			100			30			30,00		
		Outcome			100			50			50,00		
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 3						87,38					
	4. penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Perubahan APBD	Input			80,30			20			16,06		
		Output			100			30			30,00		
		Outcome			100			50			50,00		
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 4						96,06					
	5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Input			36,08			20			7,22		
		Output			100			30			30,00		
		Outcome			100			50			50,00		
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 5						87,22					
	6. Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Input			50,64			20			10,13		
		Output			100			30			30,00		
		Outcome			100			50			50,00		
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 6						90,13					
	7. Penyusunan Rancangan peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Input			100,00			20			20,00		
		Output			100			30			30,00		
		Outcome			100			50			50,00		
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 7						100,00					
	8. Penunjang Operasional Administrasi Bantuan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	Input			99,91			20			19,98		
		Output			100			30			30,00		
		Outcome			100			50			50,00		
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 8						99,98					

Program	Uraian	Kelompok Indikator Kinerja	Capaian Kelompok Indikator Kinerja	Bobot Kelompok Indikator Kinerja	Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	9. Pengelolaan Dan Pengadaan Aset/Barang Daerah dan Investasi Daerah	Input	70,91	20	14,18
		Output	100	30	30,00
		Outcome	100	50	50,00
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 9	94,18		
	10. Penyusunan Laporan Semester & Prognosis Untuk 6 (enam) bulan berikutnya	Input	94,66	20	18,93
		Output	100	30	30,00
		Outcome	100	50	50,00
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 10	98,93		
	11. Penatausahaan Keuangan Bendahara Umum Daerah	Input	99,89	20	19,98
		Output	100	30	30,00
		Outcome	100	50	50,00
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 11	99,98		
	12. Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Input	88,74	20	17,75
		Output	100	30	30,00
		Outcome	100	50	50,00
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 12	97,75		
13. Peningkatan Pemungutan PBB	Input	88,74	20	17,75	
	Output	100	30	30,00	
	Outcome	100	50	50,00	
	Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 13	97,75			
14. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Input	78,32	20	15,66	
	Output	100	30	30,00	
	Outcome	100	50	50,00	
	Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 14	95,66			
15. Pengelolaan Kas Daerah	Input	73,25	20	14,65	
	Output	100	30	30,00	
	Outcome	100	50	50,00	
	Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 15	94,65			
16. Pengelolaan Administrasi Gaji Pegawai	Input	39,33	20	7,87	
	Output	100	30	30,00	
	Outcome	100	50	50,00	
	Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 16	87,87			

Program	Uraian	Kelompok Indikator Kinerja	Capaian Kelompok Indikator Kinerja	Bobot Kelompok Indikator Kinerja	Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja	
1	2	3	4	5	6	
	17. Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Input				
		Output	20,93	20	4,19	
		Outcome	100	30	30,00	
	18. Pengkajian Kebijakan Anggaran Belanja Daerah					
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 17			50	50,00
						84,19
	19. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Input		23,51	20	4,70
		Output		100	30	30,00
		Outcome		100	50	50,00
	20. Rekonsiliasi Data Penerimaan Kabupaten					
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 18				84,70
	21. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Input		66,61	20	13,32
		Output		100	30	30,00
		Outcome		100	50	50,00
	22. Pengelolaan Dana Transfer					
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 19				93,32
	23. Pengolahan data penerimaan PAD	Input		89,74	20	17,95
		Output		100	30	30,00
		Outcome		100	50	50,00
	24. Pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi					
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 20				97,95
	25. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Input		99,61	20	19,92
		Output		100	30	30,00
		Outcome		100	50	50,00
	26. Pengelolaan Dana Transfer					
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 21				99,92
	27. Pengolahan data penerimaan PAD	Input		71,81	20	14,36
		Output		100	30	30,00
Outcome			100	50	50,00	
28. Pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi						
	Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 22				94,36	
29. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Input		99,95	20	19,99	
	Output		100	30	30,00	
	Outcome		100	50	50,00	
30. Pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi						
	Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 23				99,99	
31. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Input		76,98	20	15,40	
	Output		100	30	30,00	
	Outcome		100	50	50,00	
32. Pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi						
	Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 24				95,40	

Program	Uraian	Kelompok Indikator Kinerja	Capaian Kelompok Indikator Kinerja	Bobot Kelompok Indikator Kinerja	Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6
7. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	25. Penagihan retribusi dan pajak daerah lainnya	Input	99,44	20	19,89
		Output	100	30	30,00
	26. Pelayanan dan pengadministrasian benda Berharga	Outcome	100	50	50,00
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 26			99,89
		Input	56,32	20	11,26
		Output	100	30	30,00
		Outcome	100	50	50,00
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 27			91,26
	1. Rekonsiliasi Data Aset/ Belanja Modal	Input	98,14	20	19,63
		Output	100	30	30,00
	2. Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	Outcome	100	50	50,00
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 1			99,63
	3. Pengamanan Aset Pemerintah Daerah	Input	57,79	20	11,56
		Output	100	30	30,00
		Outcome	100	50	50,00
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 2			91,56
	4. Tindak Lanjutan Hasil Temuan Pengawasan	Input	29,24	20	5,85
		Output	100	30	30,00
	5. Penghapusan Barang Milik Daerah	Outcome	100	50	50,00
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 3			85,85
		Input	0	20	0,00
		Output	100	30	30,00
		Outcome	100	50	50,00
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 4			80,00
		Input	97,66	20	19,53
		Output	100	30	30,00
		Outcome	100	50	50,00
		Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 5			99,53

LAMPIRAN 5

EVALUASI KINERJA PROGRAM

EVALUASI KINERJA PROGRAM
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018

Program	Uraian	Nilai Capaian Kegiatan	Bobot Kegiatan (%)	Nilai Capaian Akhir Kegiatan
1	2	3	4	5
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan listrik	97,17	8,77	852,18
	2. Penyediaan jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	85,79	6,24	535,32
	3. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	98,27	6,39	627,96
	4. Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	99,98	5,87	586,87
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	100,00	6,66	666,00
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99,97	6,87	686,79
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	100,00	9,43	943,00
	8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	97,77	7,54	737,22
	9. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	100,00	6,20	620,00
	10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92,69	6,34	587,65
	11. Penyediaan Makanan Dan Minuman	98,64	6,16	607,61
	12. Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	99,99	7,64	763,94
	13. Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi Dan Kegiatan (Honor Daerah)	99,77	9,34	931,85
	14. Fasilitas Kegiatan, Rapat-Rapat, Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	94,37	6,55	618,10
Jumlah Nilai capaian Program 1				9.764,49

Program	Uraian	Nilai Capaian Kegiatan	Bobot Kegiatan (%)	Nilai Capaian Akhir Kegiatan
1	2	3	4	5
2. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1. Pembangunan Gedung Kantor	99,95	17,21	1.720,17
	2. Pengadaan peralatan gedung kantor	99,95	18,38	1.837,12
	3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	99,60	16,86	1.679,22
	4. Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	93,02	29,32	2.727,35
	5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	98,75	18,23	1.800,25
	Jumlah Nilai capaian Program 2			9.764,11
3. Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100,00	100,00	10.000,00
	Jumlah Nilai Capaian Program 3			10.000,00
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	99,78	100,00	9.977,80
	Jumlah Nilai Capaian Program 4			9.977,80
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	100,00	100	10.000,00
	1. Penyusunan Pelaporan Semesteran	100,00	100	10.000,00
	2. Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	100,00	100	10.000,00
	Jumlah Nilai Capaian Program 5			30.000,00

Program	Uraian	Nilai Capaian Kegiatan			Bobot Kegiatan (%)		Nilai Capaian Akhir Kegiatan	
		3			4		5	
1	2							
6. Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan Standar Satuan Harga	91,48			3,65		333,89	
	2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	94,69			3,55		336,16	
	3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	87,38			4,29		374,86	
	4. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	96,06			4,69		450,52	
	5. penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	87,22			4,69		409,04	
	6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	90,13			4,52		407,38	
	7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100,00			4,98		498,00	
	8. Penunjang Operasional Administrasi Bantuan Hibah, Bantuan Sosial & Bantuan Keuangan	99,98			4,01		400,93	
	9. Pengelolaan dan Pengadaan Aset/Barang Daerah Investasi Daerah	94,18			4,09		385,20	
	10. Penyusunan Laporan Semester & Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya	98,93			3,77		372,97	
	11. Penatausahaan Keuangan Bendahara Umum Daerah	99,98			3,50		349,92	
	12. Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	97,75			3,87		378,28	
	13. Peningkatan Pemungutan PBB	97,75			3,23		315,73	
	14. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah	95,66			4,21		402,75	
	15. Pengelolaan Kas Daerah	94,65			3,66		346,42	
	16. Pengelolaan Administrasi Gaji Pegawai	87,87			5,21		457,78	
	17. Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	84,19			4,65		391,46	

Program	Uraian	Nilai Capaian Kegiatan	Bobot Kegiatan (%)	Nilai Capaian Akhir Kegiatan
1	2	3	4	5
7. Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	18. Pengkajian Kebijakan Anggaran Belanja Daerah	84,70	4,12	348,97
	19. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah	93,32	4,22	393,82
	20. Rekonsiliasi Data Penerimaan Kabupaten	97,95	3,99	390,81
	21. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	99,92	4,44	443,65
	22. Pengelolaan Dana Transfer	94,36	5,32	502,01
	23. Pengolahan data penerimaan PAD	99,99	2,11	210,98
	24. Pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi	95,40	2,10	200,33
	25. Penagihan retribusi dan pajak daerah lainnya	99,89	5,32	531,40
	26. Pelayanan dan pengadministrasian benda berharga	91,26	2,11	192,57
	Jumlah Nilai Capaian Program 6			9.101,87
	1. Rekonsiliasi Data Aset/ Belanja Modal	99,63	20,26	2.018,46
	2. Revaluasi/ Appraisal Aset/Barang Daerah	91,56	21,35	1.954,76
	3. Pengamanan Aset Pemerintah Daerah	85,85	17,10	1.468,00
	4. Tindak Lanjutan Hasil Temuan Pengawasan	80,00	20,21	1.616,80
	5. Penghapusan Barang Milik Daerah	99,53	21,08	2.098,13
Jumlah Nilai Capaian Program 7				9.156,16